

Abstrak

Peradaban ketatanegaraan mengalami perubahan, seperti halnya Indonesia era kekinian, seleksi menteri melibatkan lembaga negara dalam menyeleksi menteri adalah kemauan presiden yang didukung masyarakat dan hal ini baik untuk masa depan ketatanegaraan kita mendatang. Tidak semata-mata menggunakan hak prerogatifnya, akan tetapi juga mendengarkan aspirasi dan transparansi publik. Konvensi semacam ini harus tetap terlaksana dalam sistem ketatanegaraan yang mengedepankan asas-asas pemerintahan yang baik dan bersih. Konvensi ketatanegaraan akan berlanjut jika Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi akan digandeng sebagai lembaga mitra Presiden dalam menentukan calon menteri-menteri di Indonesia.